



**PEMERINTAH
KOTA MALANG**
Misi Tugu Nomor 1 Malang

**MALANGKUCEWARA
BERMARTABAT**



LAPORAN KINERJA PEMERINTAH KOTA MALANG

TAHUN 2020



www.malangkota.go.id



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang

Pernyataan Telah Direview



PEMERINTAH KOTA MALANG INSPEKTORAT DAERAH

JL. GAJAHMADA NOMOR 2A MALANG TELP.(0341) 364450 – 321276

KODE POS 65119

PERNYAATAN TELAH DIREVIU

Kami telah mereviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Pemerintah Kota Malang untuk Tahun Anggaran 2020 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab manajemen.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ini.

Malang, 22 Maret 2021

INSPEKTUR DAERAH KOTA MALANG,



Drs. ABDUL MALIK, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610615 198201 1 021

Ringkasan Eksekutif

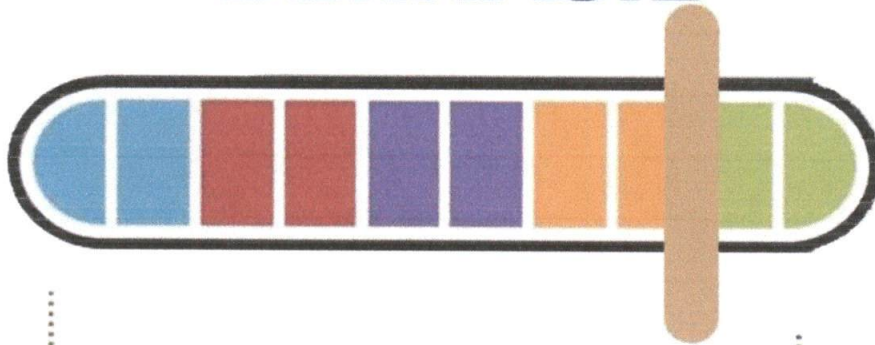
Tata pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan refleksi dari usaha reformasi birokrasi yang dikelola dengan baik. Begitu halnya dengan Pemerintah Kota Malang selaku penyelenggara negara dan pemerintahan yang bercita - cita mensejahterakan masyarakat serta berupaya dengan berbagai kebijakan dan program yang secara operasional bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat dalam bentuk kinerja yang prima.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2020 masuk dalam kategori “BERHASIL”, karena rata-rata capaiannya 91,72% dari target. Mayoritas indikator kinerja sudah tercapai dengan baik, Belum dapat tercapainya target 100% dikarenakan pada tahun 2020 terjadi bencana non-alam berupa pandemic COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor terutama sektor perekonomian. Adaptasi kondisi *new normal* membuat kita harus lebih mempersiapkan inovasi dalam pencapaian target kinerja sehingga perubahan pola kerja dalam pandemic COVID-19 cukup mempengaruhi pencapaian kinerja. Masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan cukup berhasil yaitu indikator Maturitas SPIP. Dengan terjadinya pandemic COVID-19 memberi dampak menurunnya aktifitas perekonomian baik nasional dan regional juga berimbas pada menurunnya aktifitas sub sektor ekonomi kreatif di Kota Malang. Akan tetapi kesiapsiagaan Pemerintah Kota Malang dalam penanganan COVID-19 ditunjukkan melalui refocusing anggaran dan kegiatan pada tahun 2020 sehingga tercapai efisiensi sumber daya dengan membandingkan kinerja dan anggaran sebesar 105,54%.

Keberhasilan capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dapat terwujud berkat dukungan semua elemen masyarakat Kota Malang, yang akan terus dipelihara dan akan ditingkatkan guna mencapai sasaran kinerja yang lebih baik pada tahun mendatang.

Capaian kinerja Pemerintah Kota Malang
Tahun 2020 masuk dalam kategori

“BERHASIL”



Rata-rata Capaian
Target Kinerja

91,72%



EFISIENSI SUMBER DAYA:
(KINERJA BANDING ANGGARAN)

105,54%

Akibat dampak pandemi COVID-19, sehingga beberapa target kinerja tidak dapat dicapai akibat menurunnya aktifitas perekonomian. Indikator pertumbuhan ekonomi kreatif perlu mendapatkan perhatian khusus ditahun mendatang seiring dengan reviu strategi pembangunan pada pemulihan dampak COVID-19



BAB 01

PENDAHULUAN

LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN 2020



www.malangkota.go.id



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang

Bab 1

Pendahuluan

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan Walikota untuk menyusun Laporan Kinerja Tahunan Pemerintah Daerah dan menyampaikannya kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Dengan demikian, Laporan Kinerja yang disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran tersebut menjadi media pertanggungjawaban dan sebagai perwujudan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* atau dalam perspektif yang lebih luas berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Akan tetapi dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelaporan Kinerja Perangkat Daerah, maka Laporan Kinerja Pemerintah merupakan bagian dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD). Sehingga Informasi Laporan Kinerja juga disampaikan dalam LPPD.





BAB 02

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN 2020



www.malangkota.go.id



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang

Bab 2 Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis merupakan suatu proses perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu tertentu berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang dilaksanakan melalui kebijakan dan program Kepala Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

RPJMD Kota Malang Tahun 2018-2023 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu lokal, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan, sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan kemampuan anggaran pembiayaan daerah.

1. Visi

Berdasarkan kondisi Kota Malang, serta peluang, tantangan dan isu strategis yang akan dihadapi dalam 5 tahun mendatang, Walikota dan Wakil Walikota membuat Visi Kota Malang Tahun 2018-2023, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023, sebagai berikut:



Perencanaan dan Visi Perencanaan Kinerja adalah sebagai berikut.

KOTA MALANG BERMAF TABAT

Bermartabat hakekatnya merupakan bentuk realisasi kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagai pemimpin kepada masyarakat yang dipimpin. Istilah "Martabat" menunjuk pada sebuah nilai harga diri kemanusiaan, yang memiliki arti kemuliaan. Sehingga, dengan visi " Kota Malang BERMARTABAT" diharapkan dapat terwujud suatu kondisi tatanan dan karakter yang mulia bagi Kota Malang dan seluruh masyarakatnya. Hal ini adalah penerjemahan langsung dari konsep Islam mengenai *baladun thoyyibatun wa robbun ghofur* (negeri yang makmur yang diridhoi oleh Allah SWT)

Untuk dapat disebut sebagai Kota BERMARTABAT, maka akan diwujudkan Kota Malang yang aman, tertib, bersih, dan asri, dimana masyarakat Kota Malang adalah masyarakat yang mandiri, makmur, sejahtera, terdidik dan berbudaya, serta memiliki nilai religius yang tinggi dilandasi dengan sikap toleransi terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di tengah-tengah masyarakat, dengan Pemerintah Kota Malang yang bersih dari KKN dan sungguh-sungguh melayani masyarakat. Sehingga, Kota Malang secara umum akan memiliki keunggulan-keunggulan dan berdaya saing tinggi untuk dapat menempatkan diri sebagai kota yang terkemuka dengan berbagai prestasi di berbagai bidang.

2. Misi

Untuk mewujudkan Visi Walikota dan Wakil Walikota ditetapkan 4 (empat) Misi sebagai berikut:

1. Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Layanan Dasar Lainnya bagi Semua Warga;
2. Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing Berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan;
3. Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran Berasaskan Keberagaman dan Keberpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender; dan
4. Memastikan Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel.

VISI KOTA MALANG BERMARTABAT

PERDA 1/2019 - RPJMD 2018-2023



4 MISI

01
MENJAMIN AKSES DAN KUALITAS PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN LAYANAN DASAR LAINNYA BAGI SEMUA WARGA

02
MEWUJUDKAN KOTA PRODUKTIF DAN BERDAYA SAING BERBASIS EKONOMI KREATIF, KEBERLANJUTAN DAN KETERPADUAN

03
MEWUJUDKAN KOTA YANG RUKUN DAN TOLERAN BERAZASKAN KEBERAGAMAN DAN KEBERPIHAKAN TERHADAP MASY. RENTAN & GENDER

04
MEMASTIKAN KEPUASAN MASYARAKAT ATAS LAY. PEMERINTAH YANG TERTIB HUKUM, PROFESIONAL DAN AKUNTABEL

4 TUJUAN

01
LAYANAN DASAR
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan lay. dasar lainnya

02
DAYA SAING EKONOMI
Terwujudnya produktivitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan

03
PEMBANGUNAN INKLUSIF
Terwujudnya Kesejahteraan dan Kerukunan Sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender

04
GOOD GOVERNANCE
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel

12 SASARAN

SASARAN 1 : PENDIDIKAN
SASARAN 2 : KESEHATAN
SASARAN 3 : DAYA BELI

SASARAN 1 : EKRAF
SASARAN 2 : INFRASTRUKTUR
SASARAN 3 : TATA RUANG & LH

SASARAN 1 : PERLIND. SOSIAL
SASARAN 2 : PEMBERDAYAAN

SASARAN 1 : PENEGAKAN PERDA
SASARAN 2 : KELEMBAGAAN
SASARAN 3 : MERITOKRASI
SASARAN 4 : PEMANFAATAN TI

3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan visi dan misi pembangunan daerah Kota Malang Tahun 2018-2023 ditetapkan 4 (empat) tujuan dan 12 (dua belas) sasaran, yaitu sebagai berikut:

Tujuan 1 : Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya, dengan indikator:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan target 81,86;

Sasaran:

1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter, dengan indikator Indeks Pendidikan dengan target 0,79;
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan, dengan indikator Indeks Kesehatan dengan target 0,816; dan
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan, dengan indikator Indeks Daya Beli/*Purchasing Power Parity* dengan target 0,848.

Tujuan 2 : Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan, dengan indikator:

- 1) Pertumbuhan Ekonomi dengan target 5,8; dan
- 2) Gini Rasio dengan target 0,37.

Sasaran:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif, dengan indikator Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dengan target 6,1%;
2. Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu dengan indikator Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI) dengan target 4,05; dan
3. Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup, dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD) dengan target 83,69 .

Tujuan 3 : Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender, dengan indikator:

- 1) Angka Kemiskinan dengan target 3,76; dan
- 2) Indeks Modal Sosial dengan target 83,52.

Sasaran:

1. Meningkatnya kualitas perlindungan sosial, dengan indikator Persentase Penurunan PMKS dengan target 5%; dan
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan, dengan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas) dengan target 85,2.

Tujuan 4 : Terwujudnya Kepuasan masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib Hukum, profesional dan Akuntabel, dengan indikator: Indeks Reformasi Birokrasi dengan target 74.

Sasaran:

1. Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum, dengan indikator Persentase perda yang ditegakkan 40%;
2. Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif, dengan indikator:
3. Nilai Sakip dengan target 80,5;
4. Opini BPK dengan target WTP;
5. Maturitas SPIP dengan target 4; dan
6. Rasio PAD dengan target 0,26.
7. Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN, dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN dengan target 72,92; dan
8. Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi, dengan indikator Indeks Kematangan SPBE dengan target 4,09.

Tabel 2.1
Matriks Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan dan
Sasaran Pembangunan Kota Malang

Misi 1		Menjamin akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, dan layanan dasar lainnya bagi semua warga							
Tujuan 1		Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,77	0,78	0,79	0,82	0,84	0,87	0,87
2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,814	0,814	0,816	0,818	0,828	0,825	0,825
3.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,845	0,847	0,848	0,850	0,851	0,852	0,852
Misi 11		Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan dan Keterpaduan							
Tujuan 2		Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persen tase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	n/a	6	6,1	6,2	6,3	6,45	6,45
2.	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	3,75	3,90	4,05	4,20	4,35	4,50	4,50
3.	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (LKLHD)	82,15	82,92	83,69	84,46	85,23	86,00	86,00

Misi 1II		Mewujudkan Kota yang rukun dan toleran berdasarkan keberagaman dan keberpihakan terhadap masyarakat rentan dan gender							
Tujuan 3		Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase penurunan PMKS	2,23%	5%	5%	5%	5%	5%	5%
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,820	0,836	0,852	0,868	0,884	0,900	0,900
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	95,25	96,8	96,9	97,0	97,10	97,20	97,20
Misi 1V		Memastikan Keluasan Masyarakat atas layanan Pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel							
Tujuan 4		Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang tertib hukum, profesional dan akuntabel							
No	Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah & tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	25%	40%	60%	82%	100%	100%
2.	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	70,96	75,65	80,5	82,05	83,05	84,9	84,9
		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	3,18	3,5	4	4,1	4,2	4,3	4,3
		Rasio PAD	0,22	0,24	0,26	0,28	0,3	0,33	0,33
3.	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	64,00	71,46	72,92	74,38	75,84	77,10	77,10
4.	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,44	3,8	4,09	4,21	4,45	4,54	4,54

Sumber : RPJMD Kota Malang 2018-2023

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai Visi Pemerintah Kota Malang 2018-2023, dengan menetapkan strategi: Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang merata didukung dengan sarana dan prasarana sesuai standar, peningkatan layanan kesehatan tingkat dasar dan pemerataan tenaga kesehatan, optimalisasi daya beli masyarakat terhadap komoditas pangan dan nonpangan melalui stabilitas harga, optimalisasi perekonomian melalui pengembangan sektor ekonomi kreatif, pengembangan pengelolaan pasar, pariwisata dan usaha mikro, peningkatan kualitas infrastruktur, sarana dan prasarana perkotaan dengan menjamin kualitas transportasi, perumahan dan permukiman serta ruang terbuka, penerapan konservasi energi, pengelolaan persampahan dan pengembangan pola tata ruang serta peningkatan kualitas lingkungan hidup, optimalisasi pendampingan pembinaan serta pemberdayaan PMKS secara berkelanjutan, menciptakan kondisi sosial yang aman dan nyaman untuk perempuan dan anak serta meningkatkan partisipasi masyarakat dan stabilitas lingkungan, meningkatkan jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), peningkatan layanan publik melalui penataan kelembagaan dalam mewujudkan pelayanan publik efektif, efisien dan proporsional, meningkatkan sistem penempatan pegawai sesuai dengan kualifikasi, kompetensi, dan kinerjanya, dan pengembangan Big data Informasi yang terintegrasi.


Arah kebijakan pembangunan Kota Malang 2018-2023, beserta keterkaitannya dengan rumusan Misi, Tujuan, Sasaran, dan Strategi yang dipilih sebagaimana tercantum dalam BAB VI Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Malang Tahun 2018-2023.

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang ditetapkan dalam Keputusan Walikota Malang Nomor: 188.45/234/35.73.402/2019 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kota Malang Tahun 2018 - 2023. Terdapat 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU) pencapaian tujuan pembangunan meliputi: (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), (2) Pertumbuhan Ekonomi, (3) Gini Ratio, (4) Angka Kemiskinan, (5) Indeks Modal Sosial, dan (6) Indeks Reformasi Birokrasi.

06

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENCAPAIAN TUJUAN

 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) TARGET: 81,86	 PERTUMBUHAN EKONOMI TARGET: 5,8	 GINI RASIO TARGET: 0,37
 ANGKA KEMISKINAN TARGET: 3,76	 INDEKS MODAL SOSIAL TARGET: 83,52	 INDEKS REFORMASI BIROKRASI TARGET: 74

Secara rinci IKU tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kota Malang tercantum pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Malang

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,79
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,816
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power parity</i>	0,848
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,1
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	4,05
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	83,69
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Persentase penurunan PMKS	5
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas)	85,2
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	96,9
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda yang ditegakkan	40%
		Nilai SAKIP	80,5
		Opini BPK	WTP
		Maturitas SPIP	4
		Rasio PAD	0,26
	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	72,92
	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,09

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.



Adapun Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

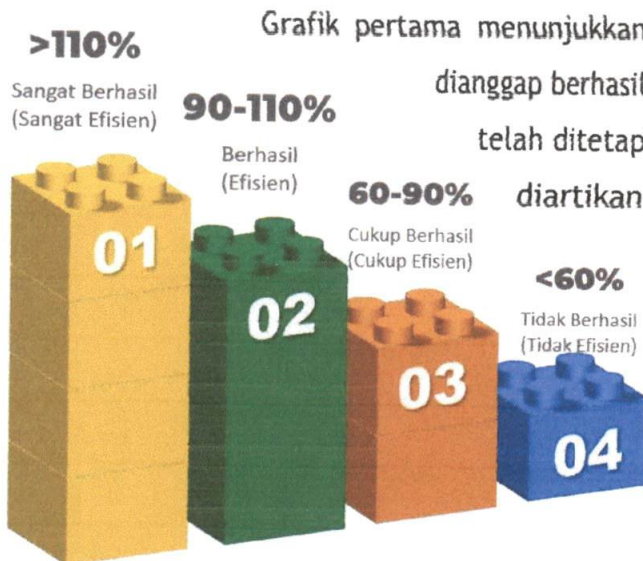
Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2020

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
1. Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,79	203.488.706.608,50
2. Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,816	282.289.836.349,90
3. Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ Purchasing Power Parity	0,848	8.619.864.370,00
4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,21%	39.835.603.604,05

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	Target	Anggaran
5.	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,05	457.950.008.836,94
6.	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	83,69	50.546.344.272,00
7.	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5	17.857.940.059,00
8.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	85,2	82.825.098.037,00
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,9	
9.	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	40%	4.273.038.400,00
10.	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	80,5	562.456.855.784,06
		Opini BPK	WTP	
		Maturitas SPIP	4	
		Rasio PAD	0,26	
11.	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	72,92	6.798.667.618,00
12.	Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,09	16.867.700.971,00

E. PARAMETER KEBERHASILAN/KEGAGALAN

Terdapat tiga aspek keberhasilan/kegagalan kinerja yang digunakan sebagai cara pengukuran, yakni Capaian Kinerja, Anggaran dan Sumber Daya yang mana parameter penentuan tingkat keberhasilan/kegagalannya dapat disimak dalam infografik berikut ini.



Grafik pertama menunjukkan level penilaian Capaian Kinerja. Kinerja dianggap berhasil apabila rerata capaian kinerja indikator yang telah ditetapkan berkisar 90-110%. Skor lebih dari 110% diartikan sangat berhasil sedangkan skor kurang dari 60% diartikan tidak berhasil.

Adapun Parameter capaian Anggaran dan Parameter Efisiensi Sumber Daya dapat disimak pada tabel dibawah ini.

Parameter Keberhasilan/Kegagalan										
Capaian Kinerja				Anggaran			Sumber Daya			
110 keatas sangat berhasil (Sangat Efisien)	90<s.d.110 berhasil (Efisien)	60<=s.d.90 Cukup berhasil (Cukup Efisien)	<60 Tidak berhasil (Tidak Efisien)	>105 Tidak Efisien	105 <=s.d.100 Cukup Efisien	<=99 Efisien	110 keatas Sangat Efisien	100 >= s.d. 110 Efisien	90>=s.d.100 Cukup Efisien	<90 Tidak Efisien



BAB 03

AKUNTABILITAS

KINERJA

LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN 2020



www.malangkota.go.id



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang

Bab 3

Akuntabilitas Kinerja

Pada bagian pengukuran capaian kinerja Pemerintah Kota Malang dalam laporan kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara target setiap indikator sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Pengukuran dilakukan terhadap capaian tahun 2020, terhadap capaian tahun sebelumnya dan terhadap target jangka menengah. Secara keseluruhan kinerja Pemerintah Kota Malang Tahun 2019 dinyatakan “berhasil”, karena rata-rata capaiannya 91,72% dari target. Belum tercapainya target 100% dikarenakan pada tahun 2020 terjadi bencana non-alam berupa pandemic COVID-19 yang berdampak pada berbagai macam sektor terutama sektor perekonomian. Adaptasi kondisi new normal membuat kita harus lebih mempersiapkan inovasi dalam pencapaian target kinerja sehingga perubahan pola kerja dalam pandemic COVID-19 cukup mempengaruhi pencapaian kinerja. Masih terdapat beberapa indikator yang tidak berhasil diantaranya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif dan Maturitas SPIP. Dengan terjadinya pandemic COVID-19 dan kebijakan penanganan COVID-19 memberi dampak menurunnya aktifitas perekonomian baik nasional dan regional juga berimbas pada menurunnya aktifitas sub sektor ekonomi kreatif di Kota Malang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun berikutnya, Pemerintah Kota Malang telah melakukan reviu prioritas pembangunan, penekanan strategi pada pemulihan dampak COVID-19 maupun target kinerja sehingga dapat mencapai kinerja yang diharapkan pada akhir RPJMD Tahun 2018-2023

a) Target kinerja dalam perjanjian kinerja

Target kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebagaimana tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,79
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,816
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power parity</i>	0,848
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,1
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	4,05
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	83,69
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Persentase penurunan PMKS	5
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas)	85,2
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	96,9
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda yang ditegakkan	40%
	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP	80,5
		Opini BPK	WTP
		Maturitas SPIP	4
		Rasio PAD	0,26
	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	72,92
	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,09

- b) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target perjanjian kinerja
 Pengukuran kinerja dalam perjanjian kinerja tahun 2020 sebagaimana
 tabel berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Visi	Kota Malang Bermartabat				
MISI 1	Menjamin Akses dan Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Layanan Dasar lainnya Bagi Semua Warga				
Terwujudnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan dan layanan dasar lainnya	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,79	0,7686	97,29%
	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,816	0,8199	100,48%
	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ Purchasing Power parity	0,848	0,8567	101,03%
MISI 2	Mewujudkan Kota Produktif dan Berdaya Saing berbasis Ekonomi Kreatif, Keberlanjutan, dan keterpaduan				
Terwujudnya produktifitas dan daya saing daerah yang merata dan berkelanjutan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,1	-13,50%	0,00%
	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	IKLI (Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur)	4,05	4,06	100,25%
	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	83,69	75,54	90,26%
MISI 3	Mewujudkan Kota yang Rukun dan Toleran berasaskan keberagaman dan keperpihakan terhadap Masyarakat Rentan dan Gender				
Terwujudnya kesejahteraan dan kerukunan sosial yang berpihak masyarakat rentan dan gender	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Persentase penurunan PMKS	5	5,02	100,40%
	Meningkatnya Pemberdayaan masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	Indeks Pembangunan masyarakat (IPMas)	85,2	82,95	97,36%
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	96,9	94,58	97,61%

Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	2020		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN
MISI 4	Memastikan Kepuasan masyarakat atas layanan Pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel				
Terwujudnya Kepuasan Masyarakat atas layanan pemerintah yang Tertib Hukum, Profesional dan Akuntabel	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase Perda yang ditegakkan	40%	54%	135%
	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	Nilai SAKIP	80,5	75	93,17%
		Opini BPK	WTP	WTP	100%
		Maturitas SPIP	4	3,0455	76,14%
		Rasio PAD	0,26	0,25	96,15%
	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	72,92	67,06	91,96%
Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,09	3,7	90,46%	

Pada indikator Pertumbuhan Ekonomi Kreatif yang mengalami kondisi Covid yang berdampak menurunnya pertumbuhan ekonomi kreatif di bawah 0% atau -13,50%, dengan Produk Domestik Bruto senilai Rp 318,8149 milyar pada tahun 2020 dikurangi Produk Domestik Bruto tahun 2019 sebesar Rp 368,5013 milyar. Namun dalam perhitungan capaian kinerja, nilai negatif di bawah 0 tidak diperhitungkan dan disamakan dengan angka 0 atau tidak mengalami pertumbuhan, sehingga capaian kinerjanya diperhitungkan dengan capaian 0%.

Pada indikator Maturitas SPIP tahun 2019 dan 2020 belum dilakukan penilaian kembali oleh BPKP, sehingga data Maturitas SPIP yang terakhir adalah hasil penilaian tahun 2018.

- c) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan tahun sebelumnya
Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan capaian kinerja tahun 2019 sebagaimana tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2018	REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020	2019	2020
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,77	0,71	0,7686	91,03 %	97,29%
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,81	0,81	0,8199	100%	100,48%
Meningkatnya daya beli terhadap	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,85	0,85	0,8567	100%	101,03%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL 2018	REALISASI KINERJA		CAPAIAN KINERJA	
			2019	2020	2019	2020
komoditas pangan dan nonpangan						
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	N/A	6,21%	-13,50%	104%	0,00%
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	3,75	4,06	4,06	104%	100,25%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	82,15	65,27	75,54	79%	90,26%
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Persentase Penurunan PMKS	-2,23%	6,81%	5,02%	136,20 %	100,40%
Meningkatnya perlindungan sosial	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	82,00%	84,63%	82,95%	101%	97,36%
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks pembangunan Gender (IPG)	95,25	94,71	94,58	98%	97,61%
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	21%	26,37%	54%	105%	135%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	6,8	7,5	75	99%	93,17%
	Opini BPK;	WTP	WTP	WTP	100%	100%
	Maturitas SPIP	3,18	3,04	3,0455	87%	76,14%
	Rasio PAD.	0,22	0,3	0,25	125%	96,15%
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	64	66,61	67,06	93%	91,96%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	2,44	2,85	3,7	75%	90,46%

d) Pengukuran capaian kinerja dibandingkan dengan target dalam pembangunan jangka menengah

Perbandingan capaian kinerja tahun 2020 dibandingkan target RPJMD tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja	CAPAIAN
			2023	2020	
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,87	0,7686	88,34%
2	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,825	0,82	99,39%
3	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,852	0,8567	100,55%
4	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6.45%	-13,50%	0,00%
5	Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,5	4,06	90,22%
6	Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	86	75,54	87,84%
7	Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Persentase Penurunan PMKS	5%	5,02%	100,40%
8	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,90	0,8295	92,17%
		Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,2	94,58	97,30%
9	Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	100%	54%	54,00%
10	Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	84,9	75	88,34%
		Opini BPK;	WTP	WTP	WTP
		Maturitas SPIP	4,3	3,0455	70,83%
		Rasio PAD.	0,33	0,25	75,76%
11	Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	77,1	67,06	86,98%
12	Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,54	3,7	81,50%

e) Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dikaitkan dengan hasil (kinerja) yang telah dicapai

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dibandingkan dengan capaian kinerja sebagaimana tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter Meningkatnya kualitas layanan kesehatan Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan nonpangan Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup Meningkatnya kualitas perlindungan sosial	Indeks Pendidikan	0,79	0,7686	97,29%	203.488.706.608,50	190.727.035.174,89	89,89%	108,23%
	Indeks Kesehatan	0,816	0,8199	100,49%	282.289.836.349,90	237.560.876.759,95	87,26%	115,16%
	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,848	0,8567	101,02%	8.619.864.370,00	7.722.374.211,96	89,16%	113,30%
	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,21%	-13,50%	0,00%	39.835.603.604,05	33.690.357.374,81	82,54%	0,00%
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,05	4,06	100,25%	457.950.008.836,94	408.951.379.915,00	91,60%	109,44%
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	83,69	75,54	90,26%	50.546.344.272,00	48.631.581.429,54	94,41%	95,60%
	Persentase Penurunan PMKS	5	5,02	100,40%	17.857.940.059,00	13.186.853.883,84	71,93%	139,58%

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Kinerja			Anggaran			%
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	85,2	82,95	97,36%	82.825.098.037,00	78.119.440.024,00	93,19%	104,47%
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	96,9	94,58	97,61%				
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	40%	54%	135%	4.273.038.400,00	3.249.395.316,00	79,75%	169,28%
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai SAKIP	80,5	75	93,17%	562.456.855.784,06	348.874.232.536,50	84,81%	109,86%
	Opini BPK;	WTP	WTP	100%				
	Maturitas SPIP	4	3,0455	76,14%				
	Rasio PAD.	0,26	0,25	96,15%				
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Indeks Profesionalisme ASN	72,92	67,06	91,96%	6.798.667.618,00	5.144.861.455,00	82,04%	112,09%
Meningkatnya integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,09	3,7	90,46%	16.867.700.971,00	16.228.489.130,00	97,16%	93,11%
				91,72%	1.733.809.664.910,45	1.392.086.877.211,49	86,98%	105,45%

f) Analisis program dan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja.

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPALAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA			PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90=<S/D 110 BERHASIL	60=<S/D90 CUKUP BERHASIL		
Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	97,29%		v		<u>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Program Pembinaan Pendidikan Dasar Program Pembinaan Ketenagaan <u>Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan <u>Dinas Pendidikan dan Kebudayaan</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA				PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90= \leq S/D 110 BERHASIL	60= \leq S/D90 CUKUP BERHASIL	<60 TIDAK BERHASIL		
Meningkatnya kualitas layanan kesehatan							Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal Program Pembinaan Pendidikan Dasar Program Pembinaan Ketenagaan <u>Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	
	Indeks Kesehatan	100,49%		v			<u>Dinas Kesehatan</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan Program BLUD Puskesmas Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPALAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA				PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90=<S/D 110 BERHASIL	60=<S/D90 CUKUP BERHASIL	<60 TIDAK BERHASIL		
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif							Program Peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan <u>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</u> Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro Program Pembinaan Koperasi Program Bina Perdagangan <u>Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam</u> Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	
	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	0%				v	<u>Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</u> Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja <u>Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan</u> Program Pelayanan Kesekretariatan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPALAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA				PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90=<S/D 110 BERHASIL	60=<S/D90 CUKUP BERHASIL	<60 TIDAK BERHASIL		
Meningkatnya pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarpras kota secara terpadu							Program Pengembangan Usaha Mikro Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar Program Pengembangan Industri Program Pembinaan Industri <u>Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata</u> Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	
	Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur (IKLI)	100,25%		v			<u>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman Program Bina Marga Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur Jalan Program Cipta Karya	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA				PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90=<S/D 110 BERHASIL	60=<S/D90 CUKUP BERHASIL	<60 TIDAK BERHASIL		
							Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah <u>Dinas Perhubungan</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pengendalian Lalu Lintas Program Pelayanan Angkutan Darat <u>Kecamatan Klojen</u> Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik <u>Kecamatan Blimbing</u> Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik <u>Kecamatan Kedungkandang</u> Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik <u>Kecamatan Lowokwaru</u> Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik <u>Kecamatan Sukun</u> Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA			PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90= \leq S/D 110 BERHASIL	60= \leq S/D90 CUKUP BERHASIL		
Meningkatnya kualitas kemanfaatan tata ruang dan lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLHD)	90,26%		▼		<u>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</u> Program Penataan Ruang dan pertanahan <u>Dinas Lingkungan Hidup</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan Program Penataan Lingkungan Hidup <u>Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman</u> Program Penataan Ruang dan pertanahan <u>Dinas Lingkungan Hidup</u>	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPALAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA			PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90=<S/D 110 BERHASIL	60=<S/D90 CUKUP BERHASIL		
Meningkatnya kualitas perlindungan sosial						Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Program Pnaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3 Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan Program Penataan Lingkungan Hidup	
	Persentase Penurunan PMKS	100,40%		v		<u>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</u> Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial <u>Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</u>	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPALAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPALAN KINERJA			PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90=<S/D 110 BERHASIL	60=<S/D90 CUKUP BERHASIL		
Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan stabilitas lingkungan						Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja	
						Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	
						Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	
	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	97,35%		v		<u>Satuan Polisi Pamong Praja</u>	
	Indeks pembangunan Gender (IPG)	97,60%		v		Program Pelayanan Kesekretariatan	
						Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Program Perlindungan Masyarakat <u>Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</u> Program Pelayanan Kesekretariatan	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPALAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA			PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90= \leq S/D 110 BERHASIL	60= \leq S/D90 CUKUP BERHASIL		
						Program Pemberdayaan Perempuan Program Perlindungan Perempuan dan Anak <u>Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pembinaan Kepemudaan Program Pembinaan Keolahragaan Bagian Kesejahteraan Rakyat Dan Masyarakat Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan masyarakat <u>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA				PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90= \leq S/D 110 BERHASIL	60= \leq S/D90 CUKUP BERHASIL	<60 TIDAK BERHASIL		
							Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan <u>Badan Penanggulangan Bencana Daerah</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana <u>Kecamatan Klojen</u> Program Pemberdayaan Masyarakat <u>Kecamatan Blimbing</u> Program Pemberdayaan Masyarakat <u>Kecamatan Kedungkandang</u> Program Pemberdayaan Masyarakat <u>Kecamatan Lowokwaru</u> Program Pemberdayaan Masyarakat <u>Kecamatan Sukun</u>	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA				PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90=<S/D 110 BERHASIL	60=<S/D90 CUKUP BERHASIL	<60 TIDAK BERHASIL		
Meningkatnya penegakan peraturan daerah dan tertib hukum	Persentase perda yang ditegakkan	135%	v				Program Pemberdayaan Masyarakat	
							Satuan Polisi Pamong Praja Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah Bagian Hukum Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal Bagian Perekonomian, Infrastruktur dan Sumber Daya Alam Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka pemantauan dan evaluasi Bagian Hubungan Masyarakat Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka penyampaian informasi melalui media	
Meningkatnya kualitas sistem kelembagaan yang efektif	Nilai Sakip	93,17%	v				Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPALAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA			PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90= \leq S/D 110 BERHASIL	60= \leq S/D90 CUKUP BERHASIL		
	Opini BPK;	100%		v		Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pengendalian, Data dan Informasi Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum <u>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk Program Pelayanan Pencatatan Sipil Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data <u>Dinas Perhubungan</u> Program Pengelolaan perparkiran <u>Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah</u> Program Pengelolaan Arsip Daerah	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPALAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPALAN KINERJA			PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90= \leq S/D 110 BERHASIL	60= \leq S/D90 CUKUP BERHASIL		
						Badan Pendapatan Daerah Program Pelayanan Kesekretariatan Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Program Pelayanan Pajak Daerah Program Pengendalian Pajak Daerah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sekretariat Daerah Bagian Pemerintahan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Bagian Organisasi Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Bagian Hubungan Masyarakat	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPALAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA				PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90= \leq S/D 110 BERHASIL	60= \leq S/D90 CUKUP BERHASIL	<60 TIDAK BERHASIL		
							Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pemerintahan Umum <u>Kecamatan Lowokwaru</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pemerintahan Umum <u>Kecamatan Sukun</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pemerintahan Umum	
	Maturitas SPIP	76,13%			v		<u>Inspektorat</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ekonomi dan sumber daya alam Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPALAN	PREDIKAT KEBERHASILAN/KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA			PROGRAM YANG MENUNJANG KEBERHASILAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA	PROGRAM YANG MENGALAMI KEGAGALAN MENCAPAI PERNYATAAN KINERJA
			110 KEATAS SANGAT BERHASIL	90= \leq S/D 110 BERHASIL	60= \leq S/D90 CUKUP BERHASIL		
Meningkatnya kualitas meritokrasi manajemen ASN	Rasio PAD.	96,15%		v		<u>Badan Pendapatan Daerah</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah Program Pelayanan Pajak Daerah Program Pengendalian Pajak Daerah	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah
	Indeks Profesionalisme ASN	91,96%		v		<u>Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia</u> Program Pelayanan Kesekretariatan Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan	
	Meningkatnya integrasi	90,46%		v		<u>Bagian Organisasi</u> Program Pengembangan Standar Kompetensi <u>Dinas Komunikasi Dan Informatika</u>	



BAB 04

PENUTUP

LAPORAN KINERJA
PEMERINTAH KOTA MALANG
TAHUN 2020



www.malangkota.go.id



Pemerintah Kota Malang



@pemkotmalang



pemkotmalang

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama, secara umum capaian kinerja masing-masing sasaran dalam kategori Berhasil . Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung adanya kerja sama yang sinergis dari seluruh Perangkat Daerah, Instansi/Lembaga dan Masyarakat . Terutama kesiapsiagaan semua elemen dalam menghadapi dan menangani pandemic COVID-19 yang berdampak pada semua sektor baik perekonomian maupun kesejahteraan sosial. Sehingga Kinerja Kota Malang masih dalam kategori “berhasil” meskipun belum dapat tercapai 100%. Berbagai inovasi telah dilakukan dalam menghadapi kondisi New Normal melalui peningkatan adaptasi digital baik di sektor pendidikan, perdagangan, kesejahteraan masyarakat melalui aplikasi si-bansos, pelayanan perizinan, kesehatan, dan sebagainya.

Keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja telah dilakukan analisis dan evaluasi, sehingga dapat diketahui langkah-langkah strategis yang dilaksanakan dalam mencapai target kinerja di tahun mendatang.



Malang, 21 Maret 2021

WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI



PEMERINTAH KOTA MALANG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. H. SUTIAJI

Jabatan : WALIKOTA MALANG

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perubahan perjanjian kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Malang, 25 September 2020
WALIKOTA MALANG,

Drs. H. SUTIAJI

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PEMERINTAH KOTA MALANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya masyarakat terdidik dan berkarakter	Indeks Pendidikan	0,79
2.	Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	Indeks Kesehatan	0,80
3.	Meningkatnya daya beli terhadap komoditas pangan dan non pangan	Indeks Daya Beli/ <i>Purchasing Power Parity</i>	0,80
4.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	6,1 %
5.	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan Infrastruktur dan Sarpras Kota secara Terpadu	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	4,05
6.	Meningkatnya Kualitas Kemanfaatan Tata Ruang dan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah (IKLHD)	83,69
7.	Meningkatnya Kualitas Perlindungan Sosial	Persentase penurunan PMKS	5 %
8.	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat dan Stabilitas Lingkungan	1. Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	0,852
		2. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,9
9.	Meningkatnya Penegakan Peraturan Daerah dan Tertib Hukum	Persentase perda yang ditegakkan	40 %
10.	Meningkatnya Kualitas Sistem Kelembagaan yang Efektif	1. Nilai Sakip	80,5
		2. Opini BPK	WTP
		3. Maturitas SPIP	4
		4. Rasio PAD	0,26
11.	Meningkatnya Kualitas Meritokrasi Manajemen ASN	Indeks Profesionalitas ASN	72,92
12.	Meningkatnya Integrasi Teknologi Informasi	Indeks Kematangan SPBE	4,09

No.	PROGRAM	PAGU
1	Program Pelayanan Kesekretariatan	140,448,645,032.40
2	Program Pendidikan Anak Usia Dini dan Non Formal	6,970,918.600.00
3	Program Pembinaan Ketenagaan	1,361,764,500.00
4	Program Pembinaan Pendidikan Dasar	175,931,949.915.50
5	Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	95,175,569.975.00
6	Program BLUD Puskesmas	30,034,962,341.16
7	Program Peningkatan Kesehatan Masyarakat	47,163,128,520.00
8	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Pelayanan Kesehatan	13,364,244,000.00

No.	PROGRAM	PAGU
9	Program Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	9,121,528,282.00
10	Program Peningkatan SDM, Kefarmasian dan Alat Kesehatan	9,752,764,575.00
11	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Farmasi dan Alat Kesehatan	12,195,065,871.00
12	Program Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah	45,753,763,500.00
13	Program BLUD Rumah Sakit Umum Daerah	10,618,066,485.74
14	Program Bina Marga	235,475,897,794.94
15	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Bidang Infrastruktur Jalan	13,873,669,000.00
16	Program Cipta Karya	123,290,437,793.00
17	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Saluran Air Limbah	1,781,338,580.00
18	Program Penataan Ruang dan pertanahan	1,357,616,000.00
19	Program Penataan Perumahan dan kawasan permukiman	14,628,634,607.00
20	Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	4,067,790,000.00
21	Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah	1,050,040,000.00
22	Program Perlindungan Masyarakat	5,266,138,308.00
23	Program Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin	1,912,075,000.00
24	Program Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial	15,760,417,000.00
25	Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja	69,040,800.00
26	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Ketenagakerjaan sektor Pelatihan dan Produktivitas	24,348,059.00
27	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Hubungan Industrial	161,100,000.00
28	Program Pemberdayaan Perempuan	703,248,500.00
29	Program Perlindungan Perempuan dan Anak	615,409,650.00
30	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	748,931,750.00
31	Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau	10,568,215,560.00
32	Program Penuaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup	786,905,780.00
33	Program Pengelolaan Persampahan dan Limbah B3	18,300,038,390.00
34	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Infrastruktur Persampahan	1,471,854,541.00
35	Program Penataan Lingkungan Hidup	1,051,457,900.00
36	Program Pelayanan Pendaftaran Penduduk	2,777,155,300.00
37	Program Pelayanan Pencatatan Sipil	2,590,659,300.00
38	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data	331,084,000.00
39	Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4,160,955,800.00
40	Program Pengendalian Lalu Lintas	11,014,048,500.00
41	Program Pelayanan Angkutan Darat	3,096,861,250.00
42	Program Pengelolaan perparkiran	1,217,750,000.00
43	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	12,006,506,031.00
44	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1,934,601,831.00
45	Program Pengembangan Usaha Mikro	715,603,750.00
46	Program Pembinaan Lingkungan Sosial di Bidang Usaha Mikro	521,396,400.00
47	Program Pembinaan Koperasi	903,223,000.00
48	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	784,315,000.00

No.	PROGRAM	PAGU
49	Program Pengendalian, Data dan Informasi	446,855,000.00
50	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Ekonomi, Pariwisata dan Sosial Budaya	140,000,000.00
51	Program Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Pekerjaan Umum	1,556,494,800.00
52	Program Pembinaan Kepemudaan	614,950,500.00
53	Program Pembinaan Keolahragaan	5,132,552,250.00
54	Program Penyelenggaraan Statistik Sektor	714,552,946.00
55	Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	441,767,040.00
56	Program Pengelolaan Keragaman dan Kekayaan Budaya	3,977,990,000.00
57	Program Pelestarian dan Pengembangan Koleksi Perpustakaan	466,147,100.00
58	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan	306,192,000.00
59	Program Pengelolaan Arsip Daerah	396,121,400.00
60	Program Peningkatan Perikanan	1,336,044,000.00
61	Program Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata	5,192,812,634.00
62	Program Pemasaran Pariwisata dan Pengembangan Ekonomi Kreatif	321,449,900.00
63	Program Peningkatan Pertanian	364,229,700.00
64	Program Peningkatan Peternakan dan Kesehatan Hewan	269,525,100.00
65	Program Bina Perdagangan	2,369,244,800.00
66	Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal	100,000,000.00
67	Program Pengembangan Kinerja Pelayanan Pasar	22,509,220,980.05
68	Program Pengembangan Industri	4,147,486,000.00
69	Program Pembinaan Industri	100,000,000.00
70	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi	1,516,900,000.00
71	Program Perencanaan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1,091,685,000.00
72	Program Perencanaan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	995,044,000.00
73	Program Perencanaan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1,436,298,000.00
74	Program Pelaporan Keuangan Daerah	1,443,268,700.00
75	Program Pemanfaatan Aset Daerah	3,471,872,500.00
76	Program Penyusunan Anggaran dan Perbendaharaan Daerah	6,107,555,100.00
77	Program Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Asli Daerah	1,244,050,000.00
78	Program Pelayanan Pajak Daerah	3,914,183,000.00
79	Program Pengendalian Pajak Daerah	2,112,932,868.50
80	Program Pengadaan dan Mutasi Kepegawaian	2,432,199,368.00
81	Program Pengembangan kompetensi dan Fasilitasi Profesi	1,603,065,500.00
82	Program Penilaian Kinerja dan Penghargaan	787,969,950.00
83	Program Penelitian dan Pengembangan	1,794,260,000.00
84	Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan	1,323,783,500.00
85	Pengembangan Kebijakan Bidang Hukum	2,445,498,400.00
86	Program Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Akuntabilitas Kinerja	1,184,801,900.00
87	Program Pengembangan Standar Kompetensi	15,223,000.00
88	Program Pengelolaan Layanan Pengadaan Barang/Jasa	1,486,705,700.00
89	Program Pengembangan Kebijakan Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan SDA	400,383,120.00

No.	PROGRAM	PAGU
90	Program Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka pemantauan dan evaluasi	177,500,000.00
91	Pengembangan kebijakan bidang kesejahteraan dan kemasyarakatan	1,573,145,100.00
92	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Keprotokolan dan Hubungan Antar Lembaga	7,945,726,500.00
93	Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai dalam rangka penyampaian informasi melalui media	500,000,000.00
94	Program Evaluasi dan Reviu Penyelenggaraan Pemerintahan	980,752,507.00
95	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang ekonomi dan sumber daya alam	37,680,000.00
96	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	45,757,000.00
97	Program Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah	161,480,000.00
98	Program Fasilitasi Pelaksanaan Tugas DPRD	40,874,031,188.00
99	Program Penyelenggaraan Kehumasan	2,196,454,000.00
100	Program Perencanaan dan keuangan	526,818,700.00
101	Program Pelayanan Kesekretariatan DPRD	16,998,554,460.00
102	Program Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	2,149,146,604.00
103	Program Penguatan Ideologi, wawasan kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama	532,633,400.00
104	Program Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	266,131,500.00
105	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana	751,838,500.00
106	Program Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana	1,029,770,000.00
107	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Penanggulangan Bencana	1,167,961,900.00
108	Program Pemberdayaan Masyarakat	40,602,977,550.00
109	Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Publik	40,242,929,662.00
110	Program Pemerintahan Umum	44,130,992,968.00

Malang, 25 September 2020

